

Pendidikan Politik Perempuan

Amirullah¹

Abstrak

Manusia merupakan elemen pokok dalam pelaksanaan berbagai aktivitas politik. Setiap manusia meskipun ia bukan sebagai subjek politik, tetapi ia pasti merupakan objek politik. Sistem politik demokratis yang dianut dan dijalankan dalam suatu negara, menghendaki partisipasi masyarakat (warga Negara). Terkait dengan sistem politik yang demokratis, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama di dalamnya. Pemenuhan hak-hak politik perempuan merupakan salah satu jalan bagi perbaikan nasib perempuan. Keterwakilan perempuan di parlemen dan pemerintahan bukan tujuan akhir, namun merupakan *entri point* bagi perjuangan demi jutaan nasib perempuan lainnya. Partai politik memiliki fungsi dan tanggung jawab yang signifikan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik dan memperjuangkan kepentingan politik perempuan. Partisipasi politik perempuan tidak akan pernah mendapat hasil selama partai politik tidak melakukan upaya-upaya maksimal dalam pemberdayaan perempuan. Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik terhadap perempuan untuk memenuhi fungsi, kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan.

Kata-kata kunci : *Pendidikan politik, dan perempuan.*

¹ Amirullah, Dosen FKIP PPKN Unsyiah, Email: jarisjaudi@gmail.com, mieritam@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Sistem politik demokratis yang dianut dan dijalankan dalam suatu negara, menghendaki partisipasi masyarakat (warga Negara) dalam setiap proses politik, akan menentukan dan memberikan pengaruh dalam setiap pengambilan keputusan yang menentukan arah, serta tujuan bangsa dan Negara tersebut. Tanpa adanya partisipasi politik dari warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, tidak mungkin dapat terbentuknya suatu pemerintahan yang demokratis. Yang akan terjadi justru sikap mendominasi dan subjektivitas dari penguasa semata, sehingga akan merugikan bangsa dan Negara tersebut secara keseluruhan.

Era demokratisasi, pemenuhan hak-hak asasi manusia terutama di bidang politik, partai politik memiliki fungsi dan tanggung jawab yang signifikan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik dan memperjuangkan kepentingan politik perempuan. Terutama sejak berbagai Undang-undang mengamanatkan peningkatan partisipasi politik perempuan melalui kebijakan penetapan kuota politik laki-laki dan perempuan dalam setiap proses politik pada masing-masing partai politik.

Lahirnya UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu yang menetapkan aturan kuota 30 % bagi perempuan sebenarnya menjadi berita baik bagi kaum perempuan. Namun ternyata, penyertaan 30% perempuan di dalam keanggotaan partai politik tidak secara otomatis mengubah paradigma partai untuk berpihak kepada perempuan. Karena terbukti bahwa keterlibatan perempuan di dalam politik

masih sangat rendah, bahkan meskipun telah ditetapkan kebijakan kuota 30 % (Murdiono, 2009: 4).

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah selama ini partai politik sudah menjalankan fungsinya untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan? Partisipasi politik perempuan tidak akan pernah mendapat hasil selama partai politik tidak melakukan upaya-upaya maksimal dalam pemberdayaan perempuan, meningkatkan kesadaran politik perempuan, kapasitas kinerja dan kepemimpinan perempuan melalui sosialisasi dan pendidikan politik serta pelatihan-pelatihan. Mengingat secara statistik perempuan memiliki akses yang sangat rendah terhadap pendidikan serta kondisi sosial budaya dan agama yang selama ini meminggirkan dan mendiskriminasikan perempuan di ranah publik dan politik. Di samping itu, UU No. 2 Tahun 2008, menyatakan bahwa partai politik mempunyai fungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat dan anggotanya. Oleh karenanya, menjadi penting untuk mengetahui, bagaimanakah implementasi pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik selama ini terhadap perempuan untuk memenuhi fungsi, kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Terutama partai-partai besar di Indonesia yang memiliki pengaruh sangat kuat di dalam pemerintahan dan memiliki pendukung yang cukup banyak, serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan pemberdayaan dan pendidikan terhadap perempuan.

Beranjak dari rendahnya keterlibatan perempuan dalam politik yang ternyata juga terjadi di Aceh, bahkan Aceh termasuk ke dalam daerah yang sama sekali tidak memiliki wakil perempuan di Parlemen nasional. Di tingkatan daerah pun, masih sangat minim caleg perempuan yang lolos ke DPRA. Atas dasar inilah penelitian ini dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendapatkan informasi tentang pendidikan politik terhadap perempuan yang dilakukan oleh partai politik.
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh partai politik dalam mengimplementasikan pendidikan politik terhadap perempuan.

KAJIAN PUSTAKA

Persoalan yang umumnya muncul pada partai-partai politik saat ini adalah pola seleksi, penjenjangan dan pendidikan bagi para anggota kurang dilakukan secara lebih memadai. Memang ada beberapa partai politik yang sudah melakukan seperti itu, namun sebagian partai politik yang lain belum melakukan secara melembaga. Fenomena munculnya 'kader instan' dan ketidaksiapan parpol dalam mengajukan calon anggota legislatif atau eksekutif, semua itu menunjukkan bahwa partai politik belum melakukan pola rekrutmen dan pendidikan secara sistematis dan ajeg. Proses kaderisasi pun masih terbatas pada pemahaman kader tentang visi-misi partai politik yang bersangkutan, belum sampai pada promosi hasil kaderisasi dan pendidikan politik untuk mengisi jabatan-jabatan publik. Untuk mengisi

jabatan-jabatan publik tersebut, umumnya partai politik mengambil dari luar kader atau anggota partai yang bersangkutan (Romli, 2008: 29-30).

Guna menaikkan *bargaining position*, sangat terkait kepada bagaimana kaum perempuan diberdayakan dalam segala segi kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan. Demikian halnya pula terkait kepada kesempatan memasuki arena politik. Seperti yang dinyatakan oleh Anugrah (2009:46-47):

“Perempuan terdidik dan tingkat intelektual, merupakan syarat mutlak bagi realisasi pencapaian keterwakilan yang efektif. Feminisasi politik memiliki aspek korelasi dengan tuntutan mencerdaskan kaum perempuan secara fair. Seorang perempuan yang berdiri di panggung politik, jika dirinya benar-benar efektif menjadi wakil rakyat, terlebih sebagai wakil dari kaum perempuan, maka kehadirannya akan memiliki nilai tambah dari tokoh-tokoh lainnya termasuk dari kaum pria yang mau berjuang untuk kesetaraan gender. Oleh karenanya, dalam kejuangannya merebut persamaan kedudukan, dan melenyapkan diskriminasi gender, kiranya pula ditumbuhkan secara fair proses pendidikan politik bagi kaum perempuan.”

Pemberdayaan gender (*gender empowerment*) menurut Mawaya dan Kabeer menegaskan pentingnya penciptaan lingkungan yang kondusif bagi perempuan untuk menggunakan kemampuannya dalam mengenali masalah-masalah sosial, termasuk juga kemampuan untuk mengambil tindakan dan pilihan strategis bagi kehidupan mereka. Pemberdayaan juga memberikan kesempatan

kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam ranah publik melalui kemampuannya mengakses sumber daya ekonomi dan kekuasaan, menjadi bagian dari pengambil keputusan dan menikmati hasil dari akses sumber daya dan pengambilan keputusan tersebut (Alfirdaus, 2008:148).

Selain program-program khusus yang disesuaikan bagi perempuan, latihan-latihan orientasi yang melibatkan laki-laki maupun perempuan juga penting. Dalam acara pelatihan bersama, perempuan di dorong untuk mengemukakan bidang-bidang kepentingan mereka dan membuat jaringan dengan rekanan laki-laki, begitu pula dengan belajar bagaimana mendobrak *codes of conduct* yang mapan. Pada saat bersamaan, wakil laki-laki akan dibuat peduli dengan isu-isu perempuan dan pentingnya wakil perempuan yang dapat bertindak efektif dalam legislatur. Karena itu, pelatihan dan orientasi anggota laki-laki memainkan peran penting dalam pengarus-utamaan isu-isu dan perspektif perempuan (Karam dkk, 1999:125).

Selain informasi tentang aturan-aturan dan prosedur parlemen yang tertulis maupun tidak tertulis, perempuan juga seharusnya dapat mengikuti pelatihan proyeksi suara dan pidato publik yang khususnya sangat membantu. Banyak perempuan yang mengalami kesulitan untuk berbicara secara otoritas dan beberapa di antaranya mendapat kesulitan untuk membuat diri mereka di dengar dalam badan-badan legislatif yang lebih besar. Pendatang baru, khususnya mereka di negara-negara demokrasi sedang berkembang, mengaku menemui kesulitan

dalam kesempatan berbicara, dan untuk mengetahui prosedur-prosedur pembicaraan di parlemen di dalam dan di luar. Termasuk di antaranya seminar dan lokakarya dimana anggota-anggota parlemen dijelaskan soal “pembicaraan media” (yakni jenis informasi apa yang diminati media dan bagaimana cara terbaik menyampaikannya) dan saran bagaimana membuat jaringan dengan pribadi media dan mana yang lebih simpati pada isu-isu perempuan (Karam dkk, 1999:126).

Oleh karena itu, setiap partai politik hendaknya mampu melakukan pendidikan politik, mencerdaskan, dan memajukan kaum perempuan terutama konstituennya. Jika kader-kader partai dari kalangan perempuan masih relatif lebih terbelakang dibanding dengan kaum pria, sedangkan perempuan merupakan aset dalam organik partai, tugas partai adalah menjadikan kaum perempuan sebagai sumber daya elit partai. Kaum perempuan harus diproses supaya siap dalam lingkaran elit partai. Proses yang ditempuh adalah bagaimana supaya kaum perempuan menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, dan memiliki jati diri (Anugrah, 2009:30-31).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Pendekatan ini biasanya menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan situasi yang terjadi, sikap dan pandangan yang menggejala di masyarakat, hubungan antar variabel, pertentangan dua kondisi atau lebih, pengaruh terhadap suatu kondisi, perbedaan antar fakta, dan lain-lain. Deskriptif kualitatif dilakukan dengan mengangkat fakta, keadaan, variabel,

dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikannya secara apa adanya. Bagdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Perilaku ini diarahkan pada latar belakang dan individu tersebut secara utuh (Moleong, 2006:4).

Data yang diperoleh melalui wawancara, studi dokumentasi, selanjutnya diolah, diinterpretasikan dengan memfokuskan pada penajaman makna sedapat mungkin dalam bentuk aslinya, yang dideskripsikan dalam bentuk narasi dengan pemaparan kontekstual, melalui kata-kata yang logis dan uraian kalimat secara jelas dengan cara mengaitkan berbagai temuan data, disertai cuplikan wawancara berupa kalimat langsung disertai komentar dari peneliti berdasarkan teori yang mendukung.

Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh. Salah satu kota sekaligus ibu kota Provinsi Aceh. Sebagai ibu kota, Banda Aceh menjadi pusat segala kegiatan pemerintahan, ekonomi, politik, sosial dan budaya. Sebelah utara Banda Aceh berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar, sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia sedangkan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar. Banda Aceh memiliki luas 61,36 km². Jumlah penduduk kota Banda Aceh sebelum terjadinya bencana Tsunami adalah sekitar 230.828 jiwa (hingga

kini belum diketahui berapa jumlah pasti penduduk Banda Aceh pasca tsunami).

Kota Banda Aceh memiliki kepadatan penduduk tertinggi diantara kabupaten/kota lainnya yakni 3.457/km². Kota Banda Aceh terdiri dari 9 Kecamatan yaitu Baiturrahman, Banda Raya, Jaya Baru, Kuta Alam, Kuta Raja, Lueng Bata, Meuraksa, Syiah Kuala, Ulee Kareng), 17 Mukim, 70 Desa dan 20 Kelurahan. Walikota Banda Aceh yang sekarang adalah Illiza Saaduddin Djamal dengan wakilnya Zainal Abidin..

Mayoritas penduduk Banda Aceh beragama Islam, meskipun terdapat penganut agama lain seperti Kristen dan Konghucu. Banda Aceh memiliki penduduk yang cukup plural, karena mayoritas penduduk merupakan pendatang. Penduduk di kota Banda Aceh pun berasal dari berbagai etnis, baik etnis Aceh sendiri seperti suku Aceh, Gayo, Aneuk Jamee, Singkil, dll maupun etnis di luar Aceh seperti Batak, Minang, Jawa bahkan etnis Tionghoa.

Perekonomian Kota Banda Aceh didominasi oleh kegiatan perdagangan dan jasa-jasa, baik jasa pemerintahan, wisata, disamping perikanan (nelayan dan petambak). Sebagai pusat segala kegiatan ekonomi, politik dan pemerintahan, masyarakat Banda Aceh memiliki tingkat aktivitas, kesibukan serta etos kerja yang cukup tinggi dan padat, sehingga dengan itu menjadikan penduduk Banda Aceh memiliki kondisi perekonomian dan kemamapanan lebih baik di banding dengan daerah lain di Aceh.

Sumber data dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dapat memberikan

informasi dan keterangan sesuai dengan permasalahan penelitian. Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak bias, partai politik yang akan menjadi sumber dan subjek penelitian ini adalah yang berdasarkan pengamatan awal, yaitu partai-partai politik besar dan berpengaruh yang secara *real* melakukan pemberdayaan dan pendidikan terhadap perempuan di Aceh, yakni Partai Golkar, PPP dan PKS.

Golkar dapat dijadikan referensi dalam hal keterwakilan perempuan di parlemen Aceh, PPP dapat dijadikan referensi dalam hal keterwakilan di bidang eksekutif dan kepemimpinan perempuan (pertama dan satu-satunya kepala daerah perempuan di Aceh, yang juga merupakan pimpinan partai berasal dari PPP), sedangkan PKS dapat dijadikan referensi dalam hal keanggotaan dan kaderisasi Partai.

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah orang yang benar-benar mengetahui secara praktikal dan konseptual mengenai hal tertentu yang terkait dengan penelitian karena tugas/jabatan/kedudukan/fungsi, seperti Ketua Umum Partai atau Sekjen Partai, Bidang/departemen Pendidikan dan Kaderisasi Partai, Ketua bidang Perempuan, anggota/kader perempuan, anggota legislatif perempuan, dari PKS, GOLKAR dan PPP.

Penelitian ini diawali dengan menjumpai pengurus partai yang menjadi objek penelitian ini, yaitu partai Golkar, PPP dan PKS kemudian difasilitasi untuk dapat melakukan wawancara dengan para pengurus partai lainnya.

Setelah mendapat persetujuan dari ketua masing-masing partai, penulis langsung menjumpai satu persatu para pengurus partai yang dapat memberikan informasi melalui wawancara. Wawancara dengan para pengurus dan pejabat teras partai, ketua bidang/departemen terkait, anggota partai dan anggota legislatif perempuan, dll yang menjadi subjek data penelitian.

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan data yang telah diolah dilakukan penafsiran dan interpretasi, untuk membuat kesimpulan, sehingga mudah untuk dipahami.

Untuk menganalisis data dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

Reduksi data ini dilakukan untuk penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan terhadap data yang dirasa masih kurang. Kegiatan mereduksi data mencakup unsur-unsur spesifik termasuk (1) proses pemilihan data atas dasar tingkat relevansi dan kaitannya dengan setiap kelompok data, (2) menyusun data dalam satuan-satuan sejenis. Pengelompokan data dalam satuan yang sejenis ini juga dapat diekuivalenkan sebagai kegiatan kategorisasi/variable, (3) membuat koding data sesuai dengan kisi-kisi kerja penelitian.

Melalui reduksi data dapat menajam, menggolong, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat diambil dan diverifikasi data.

Data kualitatif dapat disederhanakan dan transformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan-nya dalam satu pola yang lebih luas, dsb. Kegiatan lain yang masih termasuk dalam mereduksi data yaitu kegiatan memfokuskan, menyederhanakan dan mentransfer dari data kasar ke catatan lapangan.

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (*display*) data. Penyajian data adalah menyusun sekumpulan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga menjadi sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis grafik, jaringan, uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, dan lain sejenisnya. Bentuk-bentuk tersebut akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih serta merencanakan kerja penelitian selanjutnya untuk mencapai tujuan penelitian.

Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data dimana makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel. Sejak awal pengumpulan data, peneliti sebaiknya mulai memutuskan antara data yang mempunyai makna dengan data yang tidak diperlukan atau tidak bermakna. Pada langkah verifikasi ini peneliti sebaiknya masih tetap terbuka untuk menerima masukan data.

HASIL PENELITIAN

Dokumen

Profil Golkar

Partai Golongan Karya (Partai Golkar) adalah sebuah partai politik di Indonesia. Sebelumnya bernama Golongan Karya (Golkar) dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar pada masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya pada tanggal 20 Oktober 1964 oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam kehidupan politik di Indonesia. Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono terpilih sebagai ketua Sekber Golkar yang pertama,.

Pada awal pertumbuhannya, Sekber Golkar beranggotakan 61 organisasi fungsional yang kemudian berkembang menjadi 291 organisasi fungsional. Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber Golkar ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO).

Untuk menghadapi Pemilu 1971, 7 KINO mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (Golkar). Logo dan nama ini, sejak pemilu 1971, tetap dipertahankan sampai sekarang. Dalam Pemilu 1971, Golongan Karya tampil sebagai pemenang. Kemenangan ini diulangi pada pemilu-pemilu berikutnya selama pemerintahan Orde Baru, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Ketika reformasi bergulir dan Soeharto berhasil dilengserkan dari jabatannya sebagai presiden Republik Indonesia, hal ini berimbas pada Golkar. Golkar juga dituntut untuk dibubarkan. Di bawah kepemimpinan Akbar Tanjung, Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar. Saat itu Golkar juga mengusung citra sebagai Golkar baru dan Akbar Tanjung berhasil mempertahankan Golkar dari serangan eksternal dan krisis citra partai.

Partai Golkar kemudian ikut dalam Pemilu 1999 dan mengalami penurunan suara di peringkat ke dua di bawah PDIP dengan perolehan 23.741.758 suara atau 22,44% dari suara sah. Namun pada pemilu legislatif 2004 Golkar menjadi pemenang pemilu legislatif dengan 24.480.757 suara atau 21,58% suara sah. Pada pemilu legislatif 2009 lalu suara Partai Golkar kembali turun ke posisi dua. Saat ini, Golkar dipimpin oleh Aburizal Bakrie yang terpilih dalam Munas VIII di Pekanbaru Riau menggantikan Jusuf Kalla.

Pada pemilu 2009, Golkar memenuhi kuota perempuan 30 persen. Dari 640 calon legislator, 164 diantaranya caleg perempuan atau 30,27 persen. Pemilu 2004 lalu, Golkar hanya mampu memenuhi 14,28 persen. Sedang pada pemilu 1999, Golkar hanya sanggup memenuhi 13,3 persen.

Partai Golkar juga menunjukkan keberpihakannya pada perempuan dengan kebijakan memprioritaskan untuk memilih caleg perempuan bila perolehan suara terbanyaknya sama dengan caleg laki-laki. Sebagaimana ditegaskan dalam surat edaran

Partai Golkar Nomor 8/2008 sebagai hasil keputusan Rapimnas IV tahun 2008.

Profil PPP

Partai Persatuan Pembangunan yang disingkat PPP adalah partai politik dengan jati diri Islam yang merupakan hasil fusi dari beberapa partai yang berbasis Islam, yaitu partai Nahdatul Ulama (NU), Partai Muslim Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSSI), dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Keempat partai tersebut memfusikan politiknya dalam satu partai politik bernama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973. Kegiatan lain yang tidak bersifat politik, tetap dilakukan oleh organisasi masing-masing sebagaimana sediakala, bahkan lebih ditingkatkan dalam pembangunan mental dan spiritual.

Dari sejak berdirinya sampai reformasi bergulir tahun 1998, PPP adalah satu-satunya partai politik yang menjadi wadah perjuangan aspirasi politik umat Islam di Indonesia. Identitas Islam PPP mencerminkan corak “Islam ke-Indonesiaan” atau “Islamnya orang Indonesia” yang berpegang pada harmoni antara universalitas Islam dan lokalitas ke-Indonesiaan. PPP dalam hal ini, meletakkan hubungan Islam dan negara dalam hubungan yang bersih, simbiotik, sinergis, serta saling membutuhkan dan memelihara.

Terwujudnya Negara Indonesia yang damai, makmur, sejahtera serta religius dan bermodal menjadi orientasi perjuangan politik PPP. Dalam mewujudkannya, PPP senantiasa menjunjung tinggi nilai dan prinsip demokrasi,

secara tegas menjaga NKRI, mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan menegakkan supremasi hukum. Dalam perjuangannya, PPP berpegang pada pemahaman Islam yang “Rahmatan Lil ‘Alamin” yakni pemahaman Islam yang inklusif, moderat, santun, damai, serta anti radikalisme.

Jabatan ketua umum pada awalnya berbentuk presidium yang terdiri dari KH Idham Chalid sebagai Presiden Partai serta Mintaredja, Thayeb Gobel, Rusli Halil dan Masykur sebagai wakil presiden partai. Sedangkan saat ini, PPP dipimpin oleh Suryadharma Ali yang juga menjabat sebagai Menteri Agama.

PPP menunjukkan keberpihakannya terhadap partisipasi politik perempuan melalui kebijakannya seperti yang tertuang di dalam AD/ART PPP yang memberikan perintah afirmatif agar perempuan di lingkungan PPP maju dan berkembang, antara lain: Pertama, Pasal 71 AD PPP memerintahkan agar setiap tingkatan kepemimpinan PPP harus memerhatikan kesetaraan dan keadilan gender berdasarkan kualitas sumber daya manusia. Kedua, dalam ketentuan komposisi Pengurus Harian di berbagai tingkatannya ada perintah afirmatif agar minimal 30 persen dari Pengurus Harian terdiri atas kaum perempuan (Pasal 15 AD PPP). Ketiga, dalam komposisi Mahkamah Partai yang mempunyai kewenangan memutus perkara perselisihan internal yang bersifat final dan mengikat ada perintah afirmatif agar 2 dari 9 anggota Mahkamah Partai terdiri atas perempuan yang bahkan dalam kenegaraan, dalam UU

Mahkamah Konstitusi pun tidak ada perintah semacam itu.

Profil PKS

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK), adalah sebuah partai politik berbasis Islam di Indonesia sebagai mana PPP. PKS berdiri pada 20 Juli 1998, dengan nama awal Partai Keadilan (disingkat PK) dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta.

Partai Keadilan bergerak melalui gerakan dakwah di kampus yang kemudian menjelma menjadi gerakan politik. Partai ini didirikan oleh sejumlah aktivis dan intelektual muda muslim, seperti Dr. M. Hidayat Nur Wahid, M.A, Lutfi Hassan Khaq, M.A dan Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Ismail, M.Sc. Nur Mahmudi kemudian diangkat menjadi Presiden Partai Keadilan pertama dengan Sekretaris Jendralnya adalah H. Anis Matta, L.c. Nur Mahmudi kemudian menjadi Menteri Kehutanan dan Perkebunan dalam kabinet pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid dan digantikan oleh Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000.

Akibat UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikutsertaan parpol pada pemilu selanjutnya (*electoral threshold*) dua persen, maka PK harus mengubah namanya untuk dapat ikut kembali di Pemilu berikutnya. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan

Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). Sehari kemudian, PK bergabung dengan PKS. Dengan penggabungan ini maka PK (Partai Keadilan) resmi berubah nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera).

Setelah Pemilu 2004, Hidayat Nur Wahid kemudian terpilih sebagai ketua MPR dan digantikan oleh Tifatul Sembiring yang terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2005-2010. Tifatul Sembiring dipercaya menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika. Maka estafet kepemimpinan pun berpindah ke Luthfi Hasan Ishaq sebagai pjs Presiden PK Sejahtera. Pada Sidang Majelis Syuro PKS II pada 16 - 20 Juni 2010 di Jakarta, Luthfi Hasan Ishaq terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2010-2015.

Pada Pemilu 2004, PKS memperoleh suara sebanyak 7,34% (8.325.020) dari jumlah total dan mendapatkan 45 kursi di DPR dari total 550 kursi di DPR. Pada 9 Juli 2008 PKS memperoleh nomor urut 8 dalam pemilu 2009 dan mendapat 57 kursi (10%) di DPR hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2009, setelah mendapat sebanyak 8.206.955 suara (7,9%) dan menjadi satu-satunya partai--selain Demokrat--yang mengalami kenaikan jumlah persentase perolehan suara.

HASIL WAWANCARA

Komitmen partai terhadap pendidikan dan peningkatan kapasitas politik perempuan

Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan, temuan-temuan melalui wawancara dan dokumentasi menunjukkan

bahwa, dari ketiga partai baik Partai Golkar, PPP dan PKS, tidak ada satupun partai yang memiliki kebijakan khusus dan program strategis terkait dengan pemberdayaan politik perempuan demi meningkatkan pemahaman, kesadaran dan partisipasi perempuan sesuai amanat kebijakan kuota 30 persen, baik di dalam visi-misi, platform, AD/ART maupun hasil keputusan-keputusan rapat besar seperti Munas, Rakornas, Rakerda.

Semua pimpinan partai menyatakan bahwa, kebijakan terkait dengan pemberdayaan perempuan adalah melalui dibentuknya Bidang/Biro Pemberdayaan Perempuan atau melalui pemberian porsi yang sama dan seimbang antara laki-laki dan perempuan di dalam memperoleh diklat-diklat dan pelatihan kader atau pada kajian-kajian rutin yang dilaksanakan oleh partai. Partai-partai tersebut juga tidak memiliki konsep yang jelas tentang pelaksanaan pendidikan politik perempuan disamping tidak menganggarkan plot dana khusus bagi pemberdayaan politik perempuan.

Partai Golkar sesungguhnya memiliki kebijakan khusus bagi perempuan pada Rencana Operasional partai Golkar dalam mensukseskan Pilkada 2010-2013, Pemilu Legislatif 2014 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014, yang memuat tentang kerja-kerja dan strategi partai di semua aspek termasuk di dalam organisasi sayap dan fungsional perempuan.

Namun sangat disayangkan bahwa yang menjadi agenda pemberdayaan bagi perempuan adalah berupa pelaksanaan pelatihan-pelatihan dan pemberdayaan yang

hanya mencakup aspek ekonomi dan sosial seperti pelatihan kewirausahaan, keterampilan industri rumah tangga, penyuluhan kesehatan ibu dan anak (Posyandu) dan pengajian dan arisan ibu-ibu. Tidak ada yang menyangkut dengan pemberdayaan di bidang politik.

Di dalam Program Kerja Bidang Perempuan DPW PKS Tahun 2011 pun, terlihat, dari 11 agenda kegiatan yang telah terlaksana selama tahun 2011, hanya ada 2 agenda kegiatan yang menyangkut dengan pemberdayaan dan pendidikan politik bagi anggota perempuan partai.

Melalui indikator-indikator di atas, menjadi sangat diragukan jika partai-partai tersebut menyatakan bahwa mereka memiliki komitmen yang baik untuk mensukseskan kebijakan kuota. Karena seperti yang dinyatakan oleh Marijan (2010:49):

“Kebijakan *affirmative action* Kuota 30 % perempuan diberlakukan karena didasarkan pada pemahaman bahwa adanya kesempatan yang sama masih belum mampu menghasilkan sesuatu yang sama (*similar result*). Kelompok-kelompok yang termarginalkan secara politik, termasuk perempuan, pada kenyataannya tidak memiliki titik pijak yang sama ketika harus bersaing dengan kelompok-kelompok yang lain. Implikasinya, mereka selalu kalah di dalam persaingan.”

Secara tidak langsung, kebijakan kuota sedang memaksakan partai-partai politik untuk menerapkan kebijakan dan strategi khusus untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Jika peningkatan kapasitas politik perempuan hanya bergantung pada diklat-diklat atau pelatihan kader yang belum tentu

dilaksanakan setahun sekali, maka apa bedanya sebelum dan sesudah kebijakan kuota diterapkan. Adanya bidang pemberdayaan perempuan pun tidak dapat dijadikan tolak ukur telah terlaksananya pendidikan politik yang efektif bagi perempuan ketika partai tidak menetapkan kebijakan mengenai konsep dasar pendidikan dan pemberdayaan politik. Pada akhirnya, bidang perempuan hanyalah sebagai bidang yang bersifat formalitas semata.

Padahal, kebijakan partai merespon isu gender merupakan suatu tantangan, terutama menjawab pembaharuan kebijakan internal untuk isu keterwakilan perempuan sebagai mandat UU Partai Politik, dan UU Pemilu. Kebijakan itu berimplikasi pada kehendak politik dan komitmen untuk memperbaharui orientasi agar berdampak yang produktif bagi parpol. Mandat keterwakilan perempuan adalah untuk melakukan pembaharuan substansi dan proses legislasi, atau membangun politik emansipatoris, yaitu politik yang punya skenario mempercepat perbaikan kualitas hidup kelompok rentan dan perempuan (Irianto dan Hendrastiti, 2008:35-6).

Pelaksanaan pendidikan politik terhadap perempuan

Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan, temuan-temuan melalui wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa, pelaksanaan pendidikan politik terhadap anggota dan kader perempuan di dalam partai terdiri dari pendidikan dan pemberdayaan yang berasal dari dalam dan dari luar partai. Bentuk pendidikan dan

pemberdayaan yang berasal dari dalam partai hanyalah berupa diklat-diklat dan pelatihan kader bersama yang diperuntukkan secara umum bagi anggota dan kader laki-laki dan perempuan.

Pada dasarnya diklat-diklat dan pelatihan kader tersebut merupakan kegiatan yang sudah terprogram, seperti pada Partai Golkar dan PPP. Namun dalam pelaksanaannya ternyata tidak memiliki skala waktu yang tetap, sangat bergantung pada kondisi, momentum pendanaan, walaupun biasanya diusahakan untuk diadakan minimal setahun sekali. Namun pendidikan dan pemberdayaan ini bersifat umum, bukan pendidikan politik khusus terhadap perempuan, sehingga tidak akan ditemukan materi-materi yang terkait kebutuhan politik perempuan seperti kepemimpinan perempuan, hak-hak dan situasi politik perempuan, strategi pemenangan bagi perempuan.

Pada Partai Golkar, memang terdapat diklat-diklat khusus perempuan terutama bagi organisasi sayap perempuannya KPPG. Dan dalam diklat yang pernah diberikan terhadap KPPG tersebut, pemberdayaan dan materi-materi yang diberikan sudah sangat baik. Namun sangat disayangkan, diklat-diklat khusus bagi perempuan tersebut jauh lebih tidak terprogram, lebih tidak terjadwal dan lebih insidental dibandingkan dengan diklat-diklat gabungan.

Di satu sisi, PPP terlihat lebih baik karena memiliki agenda untuk melaksanakan diskusi bulanan yang diikuti oleh anggota perempuan PPP, yang juga menjadi sarana untuk saling berbagi informasi tentang

persoalan perempuan dan politik. Pelaksananya cukup rutin, namun kehadiran peserta diskusi selama ini pun belum maksimal. Di PKS, yang terjadi justru, adanya pemilahan dalam memperoleh pendidikan politik antarsesama anggota karena pendidikan politik yang berkesinambungan hanya diberikan pada tokoh-tokoh perempuan. PKS memang memberikan pembinaan secara berkesinambungan pada seluruh anggota, namun hanya dalam persoalan dakwah dan keislaman. Sedangkan pendidikan politik terhadap perempuan yang bersifat reguler dan menyeluruh seolah luput dari perhatian partai.

Kondisi dimana partai politik tidak dapat melaksanakan pendidikan dan pemberdayaan politik secara intensif, terjadwal, reguler, dan menyeluruh bagi anggota dan kader perempuannya sungguh ironis di tengah desakan besar peningkatan partisipasi politik terhadap perempuan. Karena seperti yang dinyatakan oleh Anugrah (2009:46-47) bahwa:

“Guna menaikkan *bargaining position* perempuan yang masih sangat minim partisipasinya dalam politik, sangat terkait kepada bagaimana kaum perempuan diberdayakan dalam segala segi kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan. Demikian halnya pula terkait kepada kesempatan memasuki arena politik. Perempuan terdidik dan tingkat intelektual, merupakan syarat mutlak bagi realisasi pencapaian keterwakilan yang efektif. Feminisasi politik memiliki aspek korelasi dengan tuntutan mencerdaskan kaum perempuan secara fair. Seorang perempuan yang berdiri di panggung politik,

jika dirinya benar-benar efektif menjadi wakil rakyat, terlebih sebagai wakil dari kaum perempuan, maka kehadirannya akan memiliki nilai tambah dari tokoh-tokoh lainnya termasuk dari kaum pria yang mau berjuang untuk kesetaraan gender. Oleh karenanya, dalam kejuangannya merebut persamaan kedudukan, dan melenyapkan diskriminasi gender, kiranya pula ditumbuhkan secara fair proses pendidikan politik bagi kaum perempuan.“

Partai politik yang terlembaga pun idealnya melakukan pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan secara reguler, karena melalui pendidikan dan pelatihan inilah diharapkan nantinya akan lahir kader dan pemimpin partai yang berkualitas (Romli, 2008:29).

Pelaksanaan pendidikan politik yang bersifat khusus dan berkualitas terhadap anggota dan kader perempuan partai, ketiga partai yang ada sangat bergantung pada lembaga International Republican Institute (IRI). Selama ini IRI cukup intens dalam melakukan pendidikan-pendidikan politik khusus terhadap anggota perempuan parpol. Pendidikan-pendidikan politik yang dilakukan oleh IRI berbentuk pelatihan-pelatihan dan *training* untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas politik perempuan. Materi-materi yang diberikan di dalam pelatihan pun sudah sangat baik, seperti mengenai kepemimpinan dan advokasi perempuan, strategi dan teknik kampanye, manajemen jaringan dan penjangkauan konstituen, *capacity building*, *public speaking*, dsb. Para pemateri yang dihadirkan oleh IRI pun merupakan pakar-

pakar dan tokoh-tokoh publik yang berpengalaman dan berkapasitas.

Namun sangat disayangkan, karena IRI merupakan NGO yang pelaksanaan kegiatannya sangat bergantung pada ada atau tidaknya program dan pendanaan, sehingga pelaksanaan pendidikan politik terhadap anggota perempuan parpol pun tidak memiliki skala waktu yang jelas dan pasti. Jika memiliki program dan dana, IRI bisa melaksanakan pendidikan politik perempuan dalam setahun hingga berkali-kali, namun jika tidak ada program dan dana, di dalam setahun belum tentu bisa melaksanakan pendidikan politik perempuan.

Jika IRI dapat melaksanakan pendidikan politik, maka barulah anggota dan kader perempuan partai memperoleh pendidikan politik khusus, jika IRI tidak melaksanakan maka mereka pun tidak akan memperoleh pendidikan politik khusus. Apalagi, tidak semua anggota perempuan dapat berpartisipasi pada semua pelatihan dan training yang dilaksanakan oleh IRI tersebut. Kebanyakan peserta bersifat delegasi, meskipun nantinya kemudian akan dilaksanakan diskusi khusus agar pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh para delegasi dapat dibagikan dan diterapkan juga oleh anggota perempuan lainnya.

Sedangkan bentuk pendidikan politik yang memanfaatkan media khusus untuk perempuan, tidak terdapat di dalam partai. Namun dalam hal ini, PKS terlihat lebih baik karena PKS memiliki situs web internet (www.pks.net) yang merupakan media informasi dan pendidikan bagi anggota, dan

pada situs tersebut terdapat rubrik yang bersifat *update* khusus untuk perempuan dan politik. Sedangkan pada partai Golkar dan PPP, media yang terdapat di partai hanya berupa tabloid bulanan dan koran harian yang bersifat umum.

Terkait pada penjenjangan dan levelisasi pada ketiga partai tersebut, memang terdapat adanya penjenjangan dan levelisasi antara anggota perempuan dalam memperoleh pendidikan politik. Namun penjenjangan yang ada bersifat bias. Jika di dalam partai Golkar, penjenjangan hanya antara anggota biasa dan pengurus, itupun hanya terkait adanya kebijakan dan keputusan partai yang bersifat khusus dan rahasia yang hanya boleh diketahui oleh pengurus.

Pada PPP, penjenjangan yang ada bersifat struktural, artinya level keanggotaan diukur berdasarkan tingkatan struktur yang mereka duduki, namun hal ini tidak terlihat begitu jelas dalam pelaksanaan pendidikan politik yang dilaksanakan. Sedangkan di PKS, penjenjangan terlihat sangat baik dan rapi karena PKS sendiri merupakan partai kader, namun penjenjangan yang ada terkait dengan pemahaman keislaman dan komitmen serta kerja-kerja dalam kepartaian. Sedangkan mengenai pendidikan politik perempuan, pembinaan intens hanya diberikan pada tokoh-tokoh perempuan semata. Dibandingkan dengan penjenjangan, kondisi ini lebih terlihat sebagai diskriminasi.

Mengenai pembinaan dan pendidikan bagi caleg perempuan, kesemua partai dari sejak dini sudah melakukan upaya untuk melakukan pembinaan dan pendidikan bagi

para caleg, baik laki-laki maupun perempuan. Namun pembinaan dan pendidikan yang bersifat intensif dilakukan tetap pada saat-saat menjelang pemilu. Sedangkan terhadap anggota legislatif perempuan, pembinaan dan pendidikan yang dilakukan baik oleh partai maupun oleh parlemen sendiri, hanya sekali waktu pada saat baru menjadi anggota legislatif. Seperti yang dinyatakan oleh Ibu Nurlelawati selaku Anggota DPRD dari fraksi partai Golkar:

“Pengetahuan dan kapasitas politik yang saya miliki sejak awal, sebagian besar berasal dari bimbingan suami, karena kebetulan suami saya (Bapak Salman Ishak) adalah pejabat dan anggota birokrasi yang sudah cukup paham tentang seluk-beluk pemerintahan. Di samping itu, pengetahuan-pengetahuan dan pengalaman-pengalaman ketika bersentuhan langsung dengan masyarakat saat saya masih di Dharma Wanita dan PKK juga sangat berkontribusi. Sedangkan yang berasal dari partai memang ada, namun sifatnya minim karena pendidikan dan pembinaan yang berasal dari partai tidak reguler.”

Padahal perempuan yang ingin berkiprah di parlemen pun tidak akan pernah mampu menjalankan fungsi dan peran maksimal tanpa adanya peningkatan kualitas pengetahuan dan kapasitas oleh partai politik. Di samping informasi tentang aturan-aturan dan prosedur parlemen yang tertulis maupun tidak tertulis, perempuan juga seharusnya dapat mengikuti pelatihan proyeksi suara dan pidato publik yang khususnya sangat membantu.

Perempuan yang mengalami kesulitan untuk berbicara secara otoritas dan beberapa di antaranya mendapat kesulitan untuk membuat diri mereka di dengar dalam badan-badan legislatif yang lebih besar. Pendatang baru, khususnya mereka di negara-negara demokrasi sedang berkembang, mengaku menemui kesulitan dalam kesempatan berbicara, dan untuk mengetahui prosedur-prosedur pembicaraan di parlemen di dalam dan di luar (Karam dkk, 1999: 124-125).

Hal yang sangat ironi adalah pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat dan konstituen perempuan oleh partai politik. Karena, baik Partai Golkar, PPP maupun PKS kesemuanya mengakui bahwa partai sangat jarang bahkan tidak pernah melakukan pendidikan politik bagi masyarakat dan konstituen perempuan. Jika pun ada, hanya pada saat-saat menjelang pemilu dan kampanye.

Partai Golkar dan PKS sesungguhnya cukup rutin melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat, namun hanya dalam aspek ekonomi, sosial dan keluarga. Di satu sisi, kegiatan-kegiatan tersebut memang terkesan lebih menarik minat dan menyentuh langsung persoalan keseharian masyarakat. Namun, sangat disayangkan bahwa alasan mengapa partai lebih membuat pemberdayaan yang bersifat ekonomi, sosial dan keluarga adalah kegiatan demikian dilakukan dengan orientasi demi meningkatkan simpati masyarakat terhadap partai dibanding dengan kegiatan pemberdayaan yang bersifat politis.

Seperti yang juga tercantum di dalam Rencana Operasional partai Golkar dalam mensukseskan Pilkada 2010-2013, Pemilu Legislatif 2014 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014: Adanya penugasan bagi setiap Pokkar untuk melakukan penggalangan teritorial di lingkungannya masing-masing antara lain kegiatan-kegiatan yang bersifat pemberdayaan ekonomi rakyat serta kegiatan yang dapat meningkatkan simpati masyarakat terhadap Partai Golkar.

UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, tujuan dan fungsi Partai politik sangat jelas menyatakan: Tujuan khusus Partai Politik adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan (Pasal 10 ayat 2 point a). Serta Partai Politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Pasal 11 ayat 1 poin a).

Benar bahwa partai politik merupakan kelompok maupun lembaga yang memiliki orientasi tertentu terutama memiliki tujuan untuk memperoleh dan mempengaruhi kekuasaan dengan cara bersaing untuk merebut dukungan masyarakat. Namun sangat disayangkan, ketika dikarenakan orientasi ini pendidikan politik masyarakat menjadi terabaikan dan masyarakat hanya menjadi objek politik yang tidak diberdayakan secara politik demi keuntungan partai semata.

Terkait dengan politik perempuan, perempuan yang ingin berpartisipasi di dalam politik dan pemerintahan tidak akan pernah memperoleh dukungan terhadap masyarakat selama partai politik tidak berusaha mengubah *mindset* masyarakat yang masih sangat patriarki. Asumsi yang menempatkan kaum perempuan tidak setara dan tidak sama penting dengan laki-laki di arena politik, menyebabkan masyarakat tersebut akan mengalami kesulitan untuk mendorong kaum perempuan di ranah lokal agar memiliki representasi (Murdiono, 2009:11).

Dan salah satu persoalan terbesar politik perempuan adalah, masyarakat dan konstituen perempuan yang secara statistik lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan konstituen laki-laki, justru tidak memilih kandidat perempuan. Hal ini dikarenakan, mereka belum paham tentang perlunya adanya perwakilan perempuan yang dapat berfungsi untuk memperjuangkan aspirasi dan nasib jutaan perempuan lainnya melalui mekanisme politik, baik melalui kebijakan dan penganggaran. Di sinilah letak pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat luas dan perempuan khususnya.

Terkait rekrutmen pun, ketiga partai tersebut tidak memiliki konsep yang memadai akan perlunya dilaksanakan pendidikan politik bagi calon dan anggota yang akan bergabung di dalam partai. Seperti yang dinyatakan oleh Romli, (2008: 29-30): “Persoalan yang umumnya muncul pada partai-partai politik saat ini adalah pola seleksi, penjenjangan dan pendidikan bagi para anggota kurang dilakukan secara lebih memadai sehingga

lahirnya fenomena munculnya ‘kader instan’ dan ketidaksiapan parpol dalam mengajukan calon anggota legislatif atau eksekutif, semua itu menunjukkan bahwa partai politik belum melakukan pola rekrutmen dan pendidikan secara sistematis dan ajeg. Proses kaderisasi pun masih terbatas pada pemahaman kader tentang visi-misi partai politik yang bersangkutan.”

Kendala-kendala dalam pelaksanaan pendidikan politik terhadap perempuan

Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan, terutama melalui pengakuan-pengakuan pengurus dan anggota perempuan partai, mereka mengalami kendala-kendala tertentu terkait pelaksanaan pendidikan politik bagi perempuan, baik itu kendala teknis, kendala yang berasal dari internal maupun dari eksternal partai.

Kendala yang dihadapi oleh Partai Golkar dan PPP dalam melaksanakan pendidikan politik terhadap perempuan adalah pada pendanaan. Karena pada setiap partai, tidak adanya plot anggaran khusus bagi pemberdayaan politik perempuan yang secara regular dan menyeluruh. Jika pun ada plot anggaran, adalah pada diklat-diklat yang pelaksanaannya insidental.

Pendanaan untuk melaksanakan pendidikan politik perempuan sepenuhnya menjadi beban para pengurus perempuan sendiri. Sehingga seperti yang terjadi di PPP, para anggota dan pengurus perempuan partai sampai harus membuat organisasi bayangan yang diberi nama Lady Care yang salah satu tujuannya adalah termasuk untuk mencari dana melalui lembaga lain. Sedangkan di Partai

Golkar, sebenarnya bisa saja membuat agenda khusus perempuan, tapi mengingat prosedural pengajuan program dan bantuan dana pengajuannya yang rumit, mereka lebih memilih untuk ikut serta pada agenda diklat gabungan saja.

Sedangkan di PKS, kendala terbesar justru berasal dari para anggota dan kader perempuan sendiri. Paradigma yang selama ini berlaku di PKS adalah tidak semua perempuan perlu terjun ke politik praktis untuk masuk ke dalam pemerintahan seperti di eksekutif dan legislatif. Bagi perempuan-perempuan PKS, politik bukan hanya seputaran pemerintahan, sehingga mereka lebih memilih untuk fokus melakukan kerja-kerja internal partai, pemberdayaan ekonomi dan keluarga serta kajian-kajian Islam. Dibandingkan terjun ke politik praktis, perempuan lebih memilih untuk mengurus anak dan keluarga. Persoalan politik di pemerintahan, perempuan mempercayakan sepenuhnya pada pihak laki-laki yang diyakini untuk mewakili kepentingan-kepentingan perempuan juga. Bagi mereka, jabatan merupakan amanah juga ladang fitnah karena mereka tidak yakin akan mampu menjalankan tanggung jawab sebagai pemangku jabatan dengan tanggung jawab rumah tangga mereka yang tidak sedikit. Dengan ini, anggota perempuan PKS sendiri tidak tertarik dan tidak merasa penting terhadap pendidikan politik perempuan.

Hal ini dibuktikan, meski PKS memiliki lebih banyak kader perempuan dibandingkan dengan anggota dan kader laki-laki namun tidak ada satu pun perempuan yang

menduduki jabatan-jabatan strategis di PKS, tidak adanya perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif baik di tingkatan provinsi maupun kabupaten/kota, apa lagi yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Paradigma dimana dengan tanggung jawab sebagai pekerja domestik, perempuan tidak dimungkinkan untuk beraktivitas di ranah publik, atas dasar anggapan bahwa tanggung jawab rumah tangga mereka akan terabaikan dan ranah publik adalah miliknya kaum adam tersebut memiliki kesamaan dengan paradigma patriarki.

Masyarakat yang menganut sistem patriarki meletakkan laki-laki pada posisi dan kekuasaan yang dominan dibandingkan perempuan. Patriarki merupakan kultur yang secara turun-temurun membentuk perbedaan perilaku, status, dan otoritas antara laki-laki dan perempuan di masyarakat sehingga perempuan sendiri meyakini bahwa kondisi tersebut merupakan suatu normalitas bahkan kodrat.

Salah satu efek dari paradigma ini adalah, stereotip yang melekat kepada perempuan sebagai pekerja domestik. Secara konvensional, laki-laki merupakan sumber utama pendapatan dalam keluarga sedangkan perempuan merupakan pengurus rumah tangga. Laki-laki bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah sedangkan perempuan bekerja di dalam rumah untuk melakukan semua pekerjaan rumah. Pada akhirnya, perempuan memiliki tanggung jawab ganda, yakni sebagai ibu yang harus merawat anak-anaknya dan istri yang melayani suaminya di rumah (Wardani, 2009: 23-26).

Jika mengamati realitas politik Indonesia, terlihat bagaimana secara kuantitas laki-laki lebih banyak yang menempati posisi-posisi strategis, baik di lembaga eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Kondisi ini berangkat dari konsep yang sudah mengakar mendaging dalam sistem patriarki bahwa perempuan lebih lemah daripada laki-laki sehingga jabatan-jabatan publik lebih tepat jika diberikan pada kaum laki-laki (Adji, dkk, 2009: 47).

Sama halnya seperti yang dimuat di dalam Jurnal Perempuan bahwa konsep nilai tentang perempuan yang menjadi gambaran (representasi) yang dirumuskan oleh PKS adalah bahwa perempuan merupakan aktor penting untuk menjalankan berbagai fungsi sosial, yang memerlukan keterlibatan perempuan, yaitu keluarga. Tugas utama perempuan sangat terkait dengan penjagaan moralitas serta upaya peningkatan kesejahteraan sosial, terutama kesejahteraan keluarga. Perempuan memiliki andil yang cukup penting dalam gerakan politik, yaitu untuk mendukung agenda kebijakan partai politik melalui demonstrasi maupun proses regenerasi yang akan menjaga kelangsungan hidup perjuangan partai. Dan meskipun tidak ada pelarangan bagi perempuan untuk aktif di ranah publik dan politik, namun dalam kenyataannya, PKS memisahkan perempuan dari pusat menjadi pinggiran (Lubis, 2009:83-84).

Selain itu, Ibu Putri selaku Sekretaris Bidang Perempuan DPW PKS menyatakan bahwa,

“Bagi para perempuan PKS, partisipasi perempuan di ranah politik praktis seperti di dalam parlemen dan pemerintahan tidak menjadi parameter agar kepentingan-kepentingan perempuan didengar dan diperhatikan, karena anggota parlemen dan pemimpin laki-laki PKS selama ini diyakini tidak hanya memperjuangkan aspirasi laki-laki semata namun juga ikut memperjuangkan aspirasi perempuan. Sedangkan terkait persoalan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat perempuan, perempuan PKS cukup selama ini sudah melakukan pemberdayaan dengan memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan guna membantu menciptakan kemandirian ekonomi bagi masyarakat perempuan. Oleh karenanya, jikapun disuruh memilih antara menjadi tokoh yang menduduki jabatan di dalam partai dan pemerintahan atau mengurus keluarga, perempuan PKS akan lebih memilih untuk mengurus anak dan keluarga.”

Anggapan yang demikian menunjukkan betapa para perempuan PKS tidak paham tentang pentingnya partisipasi politik perempuan demi menciptakan pemerintahan yang berspektif gender demi perbaikan kualitas hidup masyarakat perempuan yang masih rentan terhadap diskriminasi dan ketidakadilan di berbagai ranah.

Pemenuhan hak-hak politik perempuan yang selama ini diperjuangkan, bukan hanya sekedar agar terpenuhinya hak partisipatif, namun lebih dari itu, peran serta dan partisipasi aktif perempuan di bidang

politik baik di parlemen dan pemerintahan menjadi suatu bentuk perjuangan konkrit yang harus ditempuh demi peningkatan kualitas hidup perempuan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penyelesaian terhadap problem yang dialami perempuan ternyata tak dapat dilakukan melalui mekanisme penyelesaian kasus perkasus mengingat betapa kompleksnya permasalahan yang dialami perempuan di berbagai ranah kehidupan, namun membutuhkan penyelesaian melalui kebijakan-kebijakan yang berbasis gender serta terlembaga melalui institusi-institusi negara. Selama ini yang terjadi adalah, pengabaian terhadap kepentingan dan pengalaman perempuan dan tidak diikutsertakannya perempuan dalam berbagai perumusan kebijakan yang bersifat publik.

Seperti yang dintakan oleh Irianto dan Hendrastiti, (2008:5-7) ada beberapa alasan mengapa betapa pentingnya perspektif gender termasuk melalui keterlibatan perempuan di dalam parlemen dan pemerintahan.

Pertama, menyangkut kewenangan dan fungsi anggota parlemen, dalam hal legislasi, penganggaran (*budgeting*) dan pengawasan (*monitoring*). Dari lembaga inilah akan lahir berbagai produk legislasi. Pengabaian tentang pengalaman hidup perempuan dan kepekaan gender akan melahirkan produk legislasi yang tidak realistis, merugikan, dan bahkan semakin menjauhkan perempuan dari aktualisasi potensi yang ada pada dirinya, yang selanjutnya akan merugikan bangsa.

Kedua, ketiadaan anggota dewan perempuan yang berperspektif gender akan melahirkan perancangan anggaran yang tidak adil karena tidak mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan realistis kaum perempuan (anak-anak khususnya dari kelompok miskin). Padahal perempuanlah yang menjadi korban terdepan dalam bidang-bidang yang paling esensial seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, bantuan hukum, dan banyak lagi.

Ketiga, ketiadaan keterwakilan perempuan secara memadai di parlemen juga akan melahirkan keterbatasan akses bagi kaum perempuan (terutama kelompok miskin), untuk menyuarakan kepentingannya. Keterwakilan perempuan secara memadai sangat penting untuk memastikan bahwa pengalaman hidup perempuan diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan. Kebijakan kuota bagi perempuan di parlemen, hendaknya dipahami sebagai *affirmative action*, dalam rangka mendorong tercapainya kemajuan hak politik perempuan ketika peran perempuan dalam bidang politik masih terbatas. Kebijakan kuota di berbagai negara telah memperlihatkan bahwa keterwakilan perempuan secara memadai di parlemen kuat relevansinya dengan kemajuan bangsa.

Keempat, kondisi hidup warga negara merupakan cerminan dari hasil (*output*) maupun dampak (*outcomes*) kebijakan publik. Kebijakan publik besar dampaknya dan akan sangat menentukan, apakah perempuan (dan anak) dapat mengakses keadilan sosial dan keadilan hukum. Telah terbukti bahwa kebijakan publik yang tidak memperhitungkan

pengalaman perempuan, berdampak pada keseluruhan kualitas pembangunan manusia. Dan selama ini, kebijakan publik yang dirancang masih buta gender (*gender blind*) dan bias kelas, yang merugikan kebanyakan perempuan dan orang miskin.

Ironis sekali bahwa pemahaman politik dasar mengenai kondisi perempuan dan upaya memperjuangkannya melalui mekanisme politik tidak dipahami bahkan oleh anggota dan pengurus bidang perempuan partai sendiri. Terang saja, para perempuan PKS tidak merasa penting untuk berpartisipasi di ranah politik parlemen dan pemerintahan. Di sini lah semakin menunjukkan betapa pentingnya pendidikan politik khusus terhadap anggota dan kader perempuan di dalam partai politik, karena jika hal ini saja tidak dipahami oleh mereka yang berkecimpung di dalam partai politik, bagaimana dengan masyarakat luas?

Partai Golkar juga mengalami kendala internal dalam melaksanakan pendidikan politik bagi anggota dan kader perempuannya dikarenakan, kebanyakan perempuan di Partai Golkar tidak begitu tertarik terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat politis dan tidak begitu antusias untuk terlibat ke dalam politik praktis seperti masuk ke dalam pemerintahan dan parlemen. Hal ini didasari pada anggapan bahwa kondisi yang terdapat di lapangan selama ini menunjukkan bahwa, penentu seseorang bisa menang dalam kontestasi pemilu adalah pada seberapa banyak uang yang dimiliki, bukan tergantung pada kualitas. Sehingga meningkatkan kualitas dan kapasitas di bidang politik tidak menjadi begitu penting

bagi perempuan di Partai Golkar, karena kualitas sebaik apapun tidak akan ada gunanya jika tidak ditopang oleh pendanaan yang kuat.

Pada kenyataannya, sistem politik Indonesia memang tidak begitu memihak pada perempuan. Gerakan perempuan Indonesia sendiri cukup dikejutkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008, tanggal 23 Desember 2008 tentang *judicial review* terhadap UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Putusan tersebut menyulitkan upaya perempuan untuk mencapai jumlah yang adil dalam parlemen, melalui dicabutnya pasal 214 UU Pemilu No. 10 Tahun 2008. Pertimbangan mengedepankan suara terbanyak memang nampak adil dalam prinsip demokrasi. Namun putusan yang tampak netral dan obyektif itu, ternyata berdampak tidak adil bila diterapkan kepada kelompok yang tidak diuntungkan (perempuan). Putusan ini lebih jauh menjadi kendala bagi upaya *affirmative action* untuk menyetarakan kelompok yang tidak diuntungkan (Irianto dan Hendrastiti, 2008:19). Liberalisasi politik di Indonesia selama ini telah menunjukkan bahwa siapa yang kuat dan memiliki pendanaan yang memadai maka dialah yang akan berkuasa. Terkait hal ini, perempuan berada pada kondisi yang sangat dirugikan. Dan pada akhirnya berdampak pada jatuhnya semangat perempuan untuk menjadikan kapasitas politik sebagai modal penting dalam memenangi kontestasi politik yang ada.

Pendidikan politik terhadap masyarakat dan konstituen perempuan pun selama ini diakui masih mengalami berbagai

kendala. Jika oleh pengurus perempuan PPP yang menyatakan bahwa kendala utama terletak pada pendanaan, maka pengurus perempuan Partai Golkar dan PKS menyatakan bahwa kendala utama terletak pada masyarakat yang tidak begitu tertarik dengan pemberdayaan di bidang politik, sehingga Partai Golkar dan PKS jarang memberikan pemberdayaan politik terhadap masyarakat dan konstituen perempuan, kecuali hanya pada saat-saat menjelang pemilu dan kampanye.

Namun, seperti yang dinyatakan oleh Ibu Nurlelawati sebagai Anggota DPRA dari Fraksi Partai Golkar:

“Ketidaktertarikan masyarakat terhadap politik seharusnya tidak menjadi alasan bagi partai politik untuk tidak melaksanakan pemberdayaan dan pendidikan di bidang politik. Masyarakat tidak tertarik justru karena mereka tidak paham pentingnya pengetahuan politik dan pentingnya berpartisipasi di dalam politik. Dan ketidakpahaman serta ketidaktertarikan masyarakat itulah yang seharusnya menjadi tugas bagi partai politik untuk mencari cara-cara strategis guna memberikan penyadaran terhadap masyarakat agar mereka tidak lagi menjadi korban politik seperti yang selama ini terjadi, terutama terhadap perempuan. Sama ketika kita menganalogikan, apa bila terdapat murid yang bodoh dan tidak mau belajar, apakah kemudian menjadi alasan bagi guru untuk tidak mau mengajarnya? Justru karena murid tersebut bodoh dan tidak ingin belajar, sang guru harus semakin giat untuk mengajarnya

agar murid tersebut menjadi pintar dan giat belajar.”

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Bentuk atau pola pendidikan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Partai Golkar bagi anggota dan kader perempuan hanya berupa diklat-diklat bersama yang diperuntukkan secara umum bagi anggota dan kader laki-laki dan perempuan. Pendidikan politik oleh PPP juga dilakukan melalui pelatihan kader bersama yang disebut dengan LKD (Latihan kader dasar) dan diskusi bulanan khusus bagi anggota perempuan. Sedangkan bagi anggota dan kader perempuan PKS pendidikan politik diperoleh melalui kajian-kajian keislaman yang dilakukan secara rutin. Dalam pelaksanaan pendidikan politik yang bersifat lebih khusus dan berkualitas terhadap anggota dan kader perempuan partai, ketiga partai yang ada sangat bergantung pada lembaga International Republican Institute (IRI). Bentuk-bentuk pendidikan politik tersebut berupa pelatihan-pelatihan dan training. Partai Golkar, PPP maupun PKS sangat jarang melakukan pendidikan politik bagi masyarakat dan konstituen perempuan.

Saran

Berikut ini dikemukakan beberapa saran, yaitu:

1. Terkait aspek hukum, adanya kelemahan di dalam Undang-Undang seperti UU Pemilu dan UU Parpol yang mengatur tentang persoalan partisipasi politik perempuan dan kebijakan kuota, yakni dimana kebijakan kuota hanya

sampai pada bakal calon yang akan maju dalam pemilu dan tidak sampai pada bakal calon, tidak adanya sanksi yang tegas bagi parpol yang tidak dapat memenuhi kuota 30 % baik di dalam pencalonan caleg maupun di dalam keanggotaan dan strukturisasi parpol, kebijakan kuota yang hanya mengacu pada aspek kuantitas tanpa menyentuh aspek kualitas (termasuk pengabaian terhadap pendidikan politik perempuan).

2. Diharapkan kepada setiap partai politik agar melakukan langkah-langkah kongkrit dalam mengimplementasikan kebijakan kuota dalam segi pendidikan dan pemberdayaan politik perempuan demi meningkatkan kesadaran politik dan memberikan bekal bagi karir politik perempuan seperti melakukan pembaharuan kebijakan internal yang mengatur konsep khusus bagi pendidikan politik perempuan.
3. Para anggota dan kader perempuan partai hendaknya mempertegas diri memiliki keberanian untuk mendesak dan menuntut sikap-sikap partai yang belum sepenuhnya berpihak terhadap perempuan, termasuk dalam hal pemberdayaan dan pendidikan politik agar perempuan tidak hanya sekedar menjadi pelengkap atau alat untuk melakukan mobilisasi dan kerja-kerja partai semata.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Muhamad, dkk. 2009. *Perempuan dalam Kuasa Patriarki*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Alfirdaus dan Laila Kholid. 2008. *Kebijakan Setengah Hati Kuota Perempuan Dalam Partai Politik Dan Parlemen*. Jurnal Konstitusi: Membangun Konstitusionalitas Indonesia, Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi. Vol. 5 Nomor 2, November. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Anugrah, Astrid. 2009. *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Arivia, Gadis, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan (YJP), Jakarta Selatan.
- Bari, Farzana. 2010. *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah*. Jakarta: United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia.
- Budiardjo, Mirriam. 2008. *Dasar-Dasar ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2006. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hidayat, Rachmad, 2004, *Ilmu yang Seksis*, Jendela, Yogyakarta.
- Hoogerwerf. 1982. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Erlangga.
- Ihromi, Tapi Omas dkk. 2006. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: PT Alumni.
- Irianto, Sulistyowati dan Titiek Kartika Hendrastiti. 2008. *Panduan tentang Gender di Parlemen*. Jakarta: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan UNDP Indonesia.
- Karam, Azza dkk. 1999. *Perempuan di Parlemen, Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Kartaprawira, Rusadi. 2004. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Kartono, Kartini. 1996. *Pendidikan Politik*. Bandung: Mandar Maju.
- Lubis, Dina Anggita. 2009. *Partisipasi Politik Perempuan DI DPD PKS Kota Medan (Persoalan, Hambatan, dan Strategi)*. Medan: Pasca Sarjana USU.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia (Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru)*. Jakarta: Drenada Media.
- Milles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif (Tentang Metode-Metode Baru)*. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, Lexi. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Murdiono, Mukhamad. 2009. *Perempuan Dalam Parlemen: Studi Analisis Kebijakan Kuota Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2009 Di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Parawansa, Khofifah Indar, dkk. 2002. *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*. Jakarta: Aneepo.
- Romli, Lili. 2008. *Masalah Kelembagaan Partai Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jurnal Penelitian Politik, (Online), Volume 5, No 1: 21-30. (<http://www.himhim.blog.fisip.uns.ac.id/files/2011/12/jurnal.pdf>, diakses pada tanggal 7 Maret 2012).
- Solechah, Siti Nur. 2009. *Rekrutmen Politik Perempuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara*. (Online), Kajian Vol 14 No.4 Desember 2009, (http://www.isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/14409547574_0853-9316.pdf, diakses pada tanggal 12 Desember 2011).
- Suratiyah, Ken. 1998. *Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemodernan*. Yogyakarta: PT. Cidesindo bekerjasama dengan U.I.I. Yogyakarta & Yayasan IPPSDM.
- Subarsono, A.Go. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tim Jurnal Perempuan. 2006. *Sejauh Mana Komitmen Negara*. Jakarta: Jurnal Perempuan.
- Wahab, Solichin Abudl. 1997. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara.
- Wardani, Eka Harisma. 2009. *Belunggu-Belunggu Patriarki: Sebuah Pemikiran Feminisme Psikoanalisis Toni Morrison Dalam The Bluest Eye*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Wibowo, Eddi dkk. 2004. *Ilmu Politik Kontemporer*. Yogyakarta: YPAPI.
- Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bayumedia
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Press.